BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD di kabupaten/kota Se-Provinsi DIY. Hal tersebut dikarenakan apabila jumlah penduduk semakin besar tetapi struktur, persebarannya hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah, maka akan menjadi beban didaerah tersebut sehingga tidak berpengaruh terhadap PAD.
2. Variabel PDRB berpengaruh positif terhadap PAD di kabupaten/kota Se-Provinsi DIY. Hal tersebut dikarenakan peningkatan PDRB menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu daerah, semakin besar PDRB yang diterima, maka semakin besar pula realisasi PAD yang didapat.
3. Variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap PAD di kabupaten/kota Se-Provinsi DIY. Hal ini dikarenakan pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat cenderung menghindari membayar pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY Tahun 2013 menunjukkan bahwa tunggakan pajak terbesar terjadi di Kabupaten

Sleman sebesar Rp. 175 Miliar, sedangkan Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunung Kidul masing-masing sebesar Rp. 78,64 Miliar, Rp. 58,18 Miliar, Rp. 17,69 Miliar, dan Rp. 17,31 Miliar. Kabupaten Sleman memiliki tunggakan pajak yang paling besar karena daerah ini memiliki objek pajak yang lebih banyak lantaran wilayahnya yang luas. Selain itu nilai jual objek pajak (NJOP) juga tinggi dibandingkan daerah lain karena seiring tingginya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman. Secara keseluruhan DIY mengalami tunggakan pajak Rp. 346 Miliar, yang didominasi dari PBB sebesar Rp. 208 Miliar dan PPN Rp. 138 Miliar. Sehingga pengeluaran pemerintah daerah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijakan tersebut. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan kegiatan pihak swasta.

4. Variabel investasi berpengaruh positif terhadap PAD di kabupaten/kota Se-Provinsi DIY. Hal ini dikarenakan tingginya minat investasi maka secara otomatis meningkatkan jumlah kegiatan perdagangan, hotel dan restoran serta pengembangan tempat-tempat wisata, yang dapat menambah pemasukan daerah tersebut sehingga berpengaruh terhadap PAD.

5.2 Implikasi dan Saran:

1. Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD dikarenakan struktur dan persebarannya hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah, maka pemerintah daerah provinsi DIY harus membuat regulasi yang tepat agar masyarakat mau dan mampu membayar pajak sesuai dengan kemampuannya.
2. PDRB berpengaruh positif terhadap PAD, bahwa dengan meningkatnya PDRB, maka PAD akan meningkat pula, sehingga program-program pembangunan dapat tercapai dan mendorong peningkatan terhadap pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas yang berada di kabupaten/kota Provinsi DIY.
3. Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap PAD dikarenakan pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran, baik dari segi belanja langsung maupun tidak langsung. Sehingga pengeluaran pemerintah tidak dapat meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya. Hal ini pemerintah diharapkan meninjau kembali pengeluaran yang akan digunakan untuk pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan dari segi pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah, perlu perhatian dari pemerintah daerah sehingga pemerintah dapat memaksimalkan PAD.
4. Investasi berpengaruh positif terhadap PAD, investasi merupakan salah satu ujung tombak dalam menggerakan perekonomian di DIY sehingga PAD dapat

meningkat, karena peran investasi yang dominan di era global maka pemerintah perlu meningkatkan dari segi perencanaan, pengelolaan serta pelayanan yang maksimal terhadap calon investor.